



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LIBURENG



**Tahun
2023**

**Kecamatan Libureng
(Jln. Kakaktua No.1 Camming Kode Pos 92766)
Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Libureng Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Libureng, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan di susunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Camming, 07 Januari 2023

CAMAT LIBURENG



ANDI SYAMSUL MUSRYA, SSTP

PANGKAT : PEMBINA IV/A

NIP. 19831105 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan.... | 5 |
| BAB II | HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 7 |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 14 |
| | 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 15 |
| | 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD | 16 |
| | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat | 23 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 24 |
| | 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 24 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ... | 25 |
| | 3.3. Program dan Kegiatan | 26 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| BAB V | PENUTUP | 34 |

Lampiran Peraturan Bupati Bone
Nomor ...Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah Perencanaan Pembangunan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA SKPD dan mengacu kepada RKPD, didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Perencanaan Program Kegiatan merupakan hal yang esensial bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kecamatan Libureng telah menetapkan langkah langkah kebijakan dalam rangka capaian progam setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) Kecamatan Libureng kurun waktu 2018 – 2023 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dimana Renstra SKPD ini dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Libureng. Rencana Kerja (RENJA) tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan program,/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Libureng tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Libureng Tahun 2023 yang merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Libureng Tahun 2018-2023 dimana program dan kegiatan prioritas yang disertasi pagu indikatif dalam renja tersebut menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Bone untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan serta dalam pelaksanaannya secara realistis diharapkan menjadi acuan kinerja Perangkat Daerah dalam memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan Keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Libureng Tahun 2023 disusun berdasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri no. 050-5889 tahun 2021 ttg hasil verifikasi, validasi dan inteventarisasi pemutakhiran Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) perencanaan pembangunan dan keuangan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Libureng Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran RKA/DPA Kantor kecamatan Libureng.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja untuk mendeskripsikan program dan kegiatan ke dalam sub kegiatan baik target kinerja, pagu indikatif maupun tolok ukur keberhasilan

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Kecamatan Libureng Tahun 2022, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana KerjaKecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalm penulisan Renja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu

Penggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renj Kecamatan Tahun Lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Review terhadap Rancangan awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan

Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Libureng tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Libureng yang dibagi kedalam dua versi yakni Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Libureng tahun berjalan (tahun 2022). Adapun gambaran selengkapnya, disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1 (T-C.29.)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022 BERDASARKAN PMDN-90

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan | |
|------|----|----|------|----|--|--|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | Target Renja Kecamatan Tahun 2021 | Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 9 | 2 | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 78% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----|---|----|----|------|----|----|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen) | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun) | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel) | 85 | 0 | 25 | 25 | 100% | 10 | 35 | 41% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan) | 9 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan) | 844 | 120 | 264 | 264 | 100% | 264 | 648 | 77% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit) | 9 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 8 | 89% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit) | 22 | 3 | 5 | 5 | 100% | 4 | 12 | 55% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | 108 | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 108 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang) | 588 | 156 | 144 | 144 | 100% | 156 | 456 | 78% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 14 | 93% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan) | 36 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 100% |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----|---|---|---|------|---|----|------|
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen) | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 60% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen) | 12 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 100% |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----|----|----|----|------|----|-----|------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional Tripika (kali) | 108 | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 108 | 100% |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan) | 45 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 45 | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas pokok fungsi utama diantaranya adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Perangkat Daerah, Pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan administrasi dan pelayanan lain berupa fasilitas kegiatan maupun pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan maka kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan intensitas terbanyak adalah pelayanan administrasi, seperti legalisasi, Pengantar Kartu Keluarga (KK), Pengantar KTP-el, Pengantar Akta Lahir, dan bentuk-bentuk pelayanan administrasi lainnya.

Pemberian pelayanan yang semakin baik menjadi tuntutan dan harapan masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban atas pelayanan yang mereka terima. Struktur masyarakat kecamatan Libureng yang heterogen menjadikan tuntutan akan pelayanan semakin tinggi, dengan perkembangan ekonomi dan demografi yang spesifik menjadikan kecamatan Libureng memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi pula. Kondisi demikian tentunya perlu mendapatkan penanganan yang lebih intens dan berkualitas, demikian halnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di kantor Kecamatan Libureng tentunya harus bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan memperkuat sistem kinerja dan mengoptimalkan masing-masing personil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selaian itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dibangun pola kebersamaan, dimana pelayanan menjadi tanggungjawab semua pegawai tidak sebatas tanggungjawab per seksi. Untuk merealisasikan hal tersebut maka

dibangun sistem pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan lintas seksi.

Berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Libureng yang dijabarkan kedalam table berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIBURENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IK K | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisi s |
|-----|---|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2020/K | Tahun 2021/K | Tahun 2022/K | Tahun 2023/K | 2020 | 2021 | 202 2 | 202 3 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | | (8) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP | | | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | | | 97 | 98 | 99 | 100 | 97 | 98,7 | 100 | 100 | |

Sumber Data : Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023

2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Libureng tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, maupun isu isu yang bersifat eksternal.

Adapun isu isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait :

1. Sumber daya manusia belum optimal
- Secara kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai.

2. Administrasi belum tertata dengan baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Libureng belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen dokumen kecamatan.

3. Sarana dan Prasarana yang terbatas

Sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas sehingga memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan secara maksimal.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Libureng untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus ampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Kecamatan Libureng merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone. Pembangunan Kabupaten Bone dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi social ekonomi politik di Kecamatan Tellu

Siattinge akan menjadi hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Bone.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Libureng membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Untuk melihat Kecamatan Libureng secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, berikut telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2023 dalam table berikut ini :

Tabel 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KECAMATAN LIBURENG

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | |
|--|--|---------------|--|------------------------|---------------------|--|---------------|--|------------------------|---------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 34,232,250,000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 12,447,553,846 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 3 dokumen | 80,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 dokumen | 9,855,000 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 1 dokumen | 16,875,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 dokumen | 1,005,000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 1 dokumen | 11,250,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 dokumen | 1,010,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|------------|----------------|---|---------------|--|-----------------|----------------|
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 1 dokumen | 11,250,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 dokumen | 9,450,000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 31,875,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 Laporan | 4,817,500 |
| 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 11,875,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 Laporan | 1,075,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Libureng | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun) | 1 Tahun | 35,000,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Libureng | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 148 orang/bulan | 11,927,875,736 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 8 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kec. Libureng | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel) | 12 stel | 14,625,000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Paket) | 12 Paket | 6,000,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Libureng | Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan) | 3 kegiatan | 90,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Libureng | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 36 Paket | 40,183,180 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Libureng | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan) | 3 kegiatan | 250,000,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Libureng | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 36 Paket | 116,141,890 |
| 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Libureng | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan) | 3 kegiatan | 27,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Libureng | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket) | 36 Paket | 9,440,000 |
| 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Libureng | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 12 kali | 14,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 Dokumen | 3,600,000 |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan) | 300 kegiatan | 82,500,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 300 Laporan | 39,810,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 13 | Pengadaan Mebel | Kec. Libureng | Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit) | 3 unit | 85,000,000 | Pengadaan Mebel | Kec. Libureng | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 unit | 3,648,420 |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Libureng | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit) | 6 unit | 85,000,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Libureng | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit) | 6 unit | 43,961,780 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Kec. Libureng | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | 36 rekening' | 41,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 Laporan | 10,855,584 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|-------------|-------------|--|---------------|---|------------|-------------|
| 16 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Kec. Libureng | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang) | 80 orang | 190,000,000 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 138,313,200 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Libureng | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit) | 4 unit | 270,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Libureng | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 unit | 50,167,456 |
| 18 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Libureng | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan) | 12 kegiatan | 70,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Libureng | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 Unit | 30,344,100 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| 19 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Libureng | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) | 1 kegiatan | 63,000,000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 Laporan | 16,854,220 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|------------|---------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| 20 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Libureng | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen) | 2 dokumen | 112,500,000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 Laporan | 15,000,520 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| 21 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Libureng | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 2 paket | 5,880,000,000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Libureng | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 Unit | 270,000,000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Libureng | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen) | 4 dokumen | 147,000,000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Libureng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas) | 2 Pokmas | 24,155,150 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | 100 Persen | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| 22 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Libureng | Jumlah Operasional Tripika (kali) | 36 kali | 220,000,000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 Laporan | 54,000,000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%) | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%) | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | |
| 23 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan) | 15 laporan | 70,000,000 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Libureng | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 15 laporan | 28,350,000 |

Pada table diatas diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Libureng pada RKPD Tahun 2022 dan analisis kebutuhan tahun 2023.pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Perubahan Renstra Kecamatan Libureng dengan Pagu rancangan RKPD sebesar **Rp.34.232.250.000** sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi **Rp. 13,852,622,946** Pada prinsipnya acuan pagu Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan sasaran dan target capaian yang ditetapkan oleh BKAD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hali ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Libureng didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten Bone jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Kecamatan Libureng sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kecamatan Libureng memiliki ruang lingkup tugas yakni Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Libureng di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah yang meliputi sebagian prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tellu

Siattinge telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Adapun yang meenjadi Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Libureng Tahun 2018-2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Libureng, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2023

Adapun tujuan dan sasaran dari Kecamatan Libureng adalah sebagai berikut :

Tujuan Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Meningkatnya Pelayanan Publik

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan
- Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi
- Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program,/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan Kecamatan Libureng.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Libureng maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Libureng Tahun 2023 berdasarkan Peraturan baru yakni Permendagri 90 Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.2 Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2023 adalah 12 kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Koordnasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.3 Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait
21. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
23. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
24. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
25. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Libureng Tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin (organic) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkat daerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Libureng Tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kabupaten Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oleh Kemendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Libureng melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|--|--|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATANANTAN | | | | | | | | 13,852,622,946 | | | 17,638,719,997 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 13,458,422,436 | | | 16,907,738,955 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.0 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 37,299,360 | | | 93,224,642 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 14,869,360 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 35,154,605 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 3,900,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 35,154,605 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,418,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 6,900,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,418,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 3,280,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,418,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 4,450,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 1,967,932 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 900,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4,693,500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 12,943,184,946 | | | 15,815,691,742 | | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|----------|----|---|---|---|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.0 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 161 Orang/bulan | 100 Persen | 12,924,584,946 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 15,810,651,742 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 18,600,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,040,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 4,488,000 | 8,400,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 16 Paket | 100 Persen | 4,488,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 8,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 134,378,560 | 598,058,273 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2. 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Paket | 100 Persen | 10,431,700 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 423,383,459 |
| 7 | 01 | 01 | 2. 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Paket | 100 Persen | 59,212,360 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 84,381,696 |
| 7 | 01 | 01 | 2. 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Paket | 100 Persen | 19,734,500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 14,690,718 |
| 7 | 01 | 01 | 2. 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,800,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,040,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.0 6 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 400 Laporan | 100 Persen | 43,200,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 70,562,400 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 60,432,270 | 72,260,910 | | | | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|---------|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | Keluara n Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Unit | 100 Persen | 12,947,900 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 18,562,500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Unit | 100 Persen | 26,959,650 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 34,668,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 20,524,720 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 19,030,410 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 200,130,000 | | | | 256,666,672 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Laporan | 100 Persen | 18,108,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 27,526,096 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 182,022,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 229,140,576 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaannaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 78,509,300 | | | | 63,436,716 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Unit | 100 Persen | 60,623,800 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 53,550,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 2,070,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 5,040,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---------|---|--|--|--|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------|-----------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 15,815,500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4,846,716 |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 15,000,510 | | | | | 5,040,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | Pengannggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | 15,000,510 | | | | | 5,040,000 |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Libureng

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Progra m | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiata n | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Realisasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 15,000,510 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 Persen | 5,040,000 |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 300,000,000 | | | | 617,870,842 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 300,000,000 | | | | 617,870,842 | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 Unit | 100 Persen | 211,965,600 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 Persen | 484,966,508 |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Pokmas / Ormas | 100 Persen | 88,034,400 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 Persen | 132,904,334 |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 27,000,000 | | | | 43,092,000 | |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasiasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 27,000,000 | | | | 43,092,000 | |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 27,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan | 100 Persen | 43,092,000 |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 52,200,000 | | | | 64,978,200 | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 52,200,000 | | | | 64,978,200 | |
| 7 01 06 2.01 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 18 Dokumen | 100 Persen | 25,200,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa | 100 Persen | 32,319,000 |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bone, Libureng, Semua Kelurahan | 100 Persen | 18 Laporan | 100 Persen | 27,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa | 100 Persen | 32,659,200 |
| TOTAL | | | | | | | | | 13,852,622,946 | | | | 17,638,719,997 | |

BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Kecamatan Libureng menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Libureng Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2023 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2023 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Libureng akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah kecamatan Libureng perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian :

kebutuhan Pagu tidak sesuai dengan Rencana, Tujuan dan Sasaran Kurang Optimal dan Pelayanan Publik di Kecamatan Libureng kurang maksimal.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Libureng agar menjadikan Pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dimasa yang akan datang guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah tahun 2023, yaitu “Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat” sehingga tercipta “Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing”.

Camming,07 Januari 2023



KAMAT LIBURENG

ANDI SYAMSUL MUSRYA, SSTP

PANGKAT : PEMBINA IV/A

NIP. 19831105 200212 1005